

Studi Komparasi Terhadap Sistem Pendidikan Islam di Negara Indonesia dan Singapura: Tinjauan Historis, Kurikulum, dan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Aulia Gita Rezka^{*1}, Ida Faridatul Hasanah²

¹²Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: ^{1*} auliagita.rezka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendidikan Islam di Indonesia dengan Singapura dalam rangka mengidentifikasi perbedaan mendasar perspektif historis, kurikulum, dan implementasi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research). Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia ada beberapa jalur seperti madrasah, pesantren dan sekolah umum yang meintegrasikan pendidikan agama. Sistem ini dinamakan relative pluralistic dan mendapatkan dukungan kuat dari negara maupun Masyarakat sipil. Sedangkan Singapura sebagai minoritas Muslim menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terbatas dalam mengelolah pendidikan Islam yang utama melalui madrasah yang berada di pengawasan ketat Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Kurikulum pendidikan Islam di Singapura menekankan keseimbangan antara Pelajaran agama dan Pelajaran umum guna menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan Masyarakat multikultural. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dinamika pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh struktur demografi, politik, dan pendekatan negara terhadap agama serta menciptakan peluang untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing negara.

Kata kunci: Perbandingan Pendidikan Islam, Pendidikan Islam di Indonesia, Pendidikan Islam di Singapura

Abstract

This research aims to identify the differences in Islamic education between Indonesia and Singapore in order to understand the fundamental differences in historical perspectives, curriculum, and the implementation of educational policies. The method used is library research. Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world, and the development of Islamic education in Indonesia occurs through several pathways, such as madrasahs, pesantren (Islamic boarding schools), and public schools that integrate religious education. This system is termed relatively pluralistic and receives strong support from both the state and civil society. In contrast, Singapore, as a Muslim minority, adopts a more structured and limited approach to managing Islamic education primarily through madrasahs that are under the strict supervision of the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS). The Islamic education curriculum in Singapore emphasizes a balance between religious studies and general subjects to ensure the relevance of graduates to the needs of a multicultural society. This comparison shows that the dynamics of Islamic education are significantly influenced by demographic structure, politics, and the state's approach to religion, creating opportunities for mutual learning and improving the quality of education in each country

Keywords: *Comparison of Islamic Education, Islamic Education in Indonesia, Islamic Education in Singapore*

Artikel Info:

Submit : April 2025

Revisi : April 2025

Terima : April 2025

Cite :

Rezka & Hasanah. (2025). Studi Komparasi Terhadap Sistem Pendidikan Islam di Negara Indonesia dan Singapura: Tinjauan Historis, Kurikulum, dan Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Journal of Educational Research and Community Service (JERCS)*, 1(2), 176-189.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memainkan peran yang krusial dalam membentuk identitas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim di berbagai negara, termasuk kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks regional ini, dinamika pendidikan Islam dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kondisi demografis, kebijakan negara terhadap agama, serta konfigurasi politik yang berlaku (Djuwairiyah & Muqit, 2017). Indonesia dan Singapura, dua negara yang secara geografis berdekatan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam struktur masyarakat dan pendekatan terhadap pendidikan Islam. Perbedaan ini menarik untuk ditelaah karena mencerminkan pengaruh konteks nasional terhadap formulasi sistem pendidikan Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengembangkan sistem pendidikan Islam yang relatif inklusif dan beragam. Lembaga-lembaga seperti madrasah, pesantren, serta sekolah umum yang mengintegrasikan pelajaran agama Islam berkembang secara dinamis, didukung oleh kebijakan negara dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia bersifat fleksibel dan kontekstual, memungkinkan adaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman (Zalnur, 2024).

Di sisi lain, Singapura, sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas, mengembangkan model pendidikan Islam yang lebih terpusat dan terstandarisasi. Pendidikan Islam difasilitasi melalui madrasah yang berada di bawah pengawasan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), dengan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan pengetahuan umum, sekaligus diselaraskan dengan standar nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterlibatan umat Muslim dalam masyarakat multikultural dan ekonomi modern (Warosari, 2022).

Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan bagaimana sistem pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-politik dan kerangka kebijakan negara masing-masing (A. Rahman et al., 2020). Namun, kajian yang secara khusus membandingkan dimensi historis, kurikulum, dan implementasi kebijakan pendidikan Islam antara Indonesia dan Singapura masih relatif terbatas. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan Islam yang kontekstual, adaptif, dan berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia dan Singapura, dengan menyoroti aspek historis, struktur kurikulum, serta implementasi kebijakan pendidikan guna mengidentifikasi strategi peningkatan mutu pendidikan Islam di kedua negara.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, dokumen resmi, serta artikel daring yang membahas sistem pendidikan Islam di Indonesia dan Singapura. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang membahas aspek-aspek seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial-politik yang memengaruhi pendidikan Islam di kedua negara tersebut. Seluruh sumber dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengungkap persamaan serta perbedaan mendasar dalam pendekatan pendidikan Islam di Indonesia dan Singapura.

Proses analisis dilakukan dengan mengkaji isi dari masing-masing referensi, lalu membandingkan elemen-elemen utama seperti tinjauan historis, kurikulum, dan implementasi kebijakan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk karakteristik pendidikan Islam di kedua negara. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pendidikan Islam di Indonesia dan Singapura, sekaligus bisa menjadi kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik dimasa depan serta bisa memperkuat hubungan antar negara dalam bidang pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar studi perbandingan ialah mendapatkan objek lain sebagai objek yang diekstraksi nilai-nilai dengan objek yang sudah ada untuk menciptakan suatu penemuan atau kesimpulan yang sama, relevan atau pertidaksamaan dan tidak sesuai diantara objek-objek tersebut yang diteliti melalui kaidah-kaidah keilmuan. (Syakrani, A. W., Malik, A., Hasbullah, H., Budi, M., & Maulidan, 2022) Dalam penelitian ini objek studi perbandingan yang akan diteliti adalah sistem pendidikan Islam yang diterapkan negara Indonesia dengan negara Singapura dengan fokus tinjauan historis, kurikulum dan implementasi kebijakan pendidikan.

Tinjauan Historis

Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia mempunyai Sejarah Panjang dan mendalam. Islam masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional yang ramai pada masa itu. Para pedagang Muslim dari Gujarat, India, memainkan peran penting dalam proses ini, menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Aceh, Barus, Palembang, dan Gresik. Interaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga menjadi sarana penyebaran ajaran Islam secara damai dan bertahap. Para pedagang tersebut, melalui hubungan sosial dan budaya, memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada komunitas lokal tanpa paksaan, memungkinkan penerimaan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Selain itu, penyebaran Islam juga didukung oleh pendekatan pendidikan, di mana para ulama mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengajarkan ajaran

Islam, memperkuat posisi agama ini di tengah masyarakat Nusantara. Madrasah, sebagai institusi pendidikan formal, relatif baru muncul sekitar abad ke-19. Sebaliknya, pesantren, yang merupakan bentuk pendidikan tradisional, sudah eksis jauh lebih lama dan

berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama sekaligus interaksi sosial. Pesantren mengajarkan kitab-kitab klasik Islam dan mengintegrasikan pendidikan agama dengan nilai-nilai budaya local.

Selama masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya marginalisasi oleh pemerintah kolonial. Namun, kondisi ini mendorong komunitas Muslim untuk mengorganisasi pendidikan Islam secara lebih sistematis, terutama melalui lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah. Meskipun pemerintah kolonial Belanda cenderung memprioritaskan pendidikan sekuler dan misi Kristen, mereka juga mengizinkan pendirian madrasah sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat pribumi. (K. Rahman, 2018)

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah Indonesia mengakui peran vital pendidikan agama dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Pendidikan Islam telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, di mana madrasah menyediakan kurikulum yang menggabungkan pelajaran umum dan pelajaran agama. Upaya untuk mereformasi pendidikan Islam terus dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas melalui pengembangan kurikulum, pelatihan bagi para guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini tercermin dalam pendirian Kementerian Agama yang bertugas mengelola pendidikan agama, termasuk madrasah dan pesantren. (Rama, 2024)

Saat ini, sistem pendidikan Islam di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup berbagai jenis lembaga seperti madrasah, pesantren, dan sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara bersamaan. Kombinasi ini mencerminkan dukungan dari masyarakat sipil dan negara dalam memajukan pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Pendidikan Islam di Singapura

Awal kedatangan Islam di Singapura, wilayah tersebut dikenal sebagai Tumasik, Kedah, atau kota laut. Terletak di semenanjung Melayu, Singapura merupakan bagian dari Nusantara. Islam diperkirakan mulai masuk ke Singapura seiring dengan perkembangan perdagangan internasional di semenanjung Malaya, terutama antara abad ke-10 dan ke-14 Masehi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara terjadi sekitar abad ke-14 melalui pedagang Arab dan India, dan komunitas Muslim pertama di Singapura terbentuk pada awal abad ke-19, yang terdiri dari orang-orang Asia Selatan dan Arab.

Proses islamisasi di Singapura pada tahap awal sangat dipengaruhi oleh tasawuf, yang menunjukkan bahwa pengaruh tasawuf sangat kuat dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Pengajaran tasawuf menjadi populer di kalangan ulama lokal dan raja-raja Melayu pada masa itu. Salah satu tarekat sufi yang masih ada hingga kini di Singapura adalah Tariqah 'Alawiyyah, yang berpusat di Masjid Ba'lawi dan dipimpin oleh Syed Hasan bin Muhammad bin Salim al-Attas. (Kosim, 2011)

Selama masa kolonialisasi, kebijakan pemerintah kolonial berusaha menghambat penyebaran Islam dan memperlambat perkembangan perdagangan Muslim. Meskipun demikian, upaya Portugis untuk menguasai Singapura tidak berhasil karena adanya perlawanan kuat dari masyarakat Melayu Muslim. Setelah Belanda mengalahkan Portugis pada tahun 1641, mereka membiarkan penguasa Melayu tradisional mempertahankan kekuasaan mereka yang terpecah akibat persaingan antar negeri.

Setelah Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris, populasi Melayu Muslim yang sebelumnya mayoritas berkurang menjadi minoritas pada sekitar tahun 1830-an akibat

imigrasi besar-besaran. Hal ini menyebabkan elit Muslim yang berpengaruh semakin sedikit, sehingga posisi mereka dalam bernegosiasi dengan pemerintah menjadi lemah. Pada awal abad ke-20, Singapura menjadi tempat transit bagi sekitar 7.000 jemaah haji asal Indonesia, menjadikannya pusat dakwah dan informasi Islam. Kota ini juga berperan penting dalam penyebaran tarekat Naqsyabandiyah di Sumatera, dengan tokoh seperti Ismail Minangkabawi yang memilih Singapura sebagai basis aktivitasnya setelah kembali dari Mekah. (Samuri, 2022)

Pada bulan Agustus 1966, parlemen Singapura mengesahkan Hukum Administrasi Islam (AMLA), yang mengatur pelaksanaan hukum Islam. Meskipun bukan hukum Islam itu sendiri, AMLA memberikan kerangka kerja bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan Pencatat Perkawinan Islam untuk menerapkan hukum syariah. Pada tahun 1968, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dibentuk untuk mengatur administrasi hukum Islam di negara tersebut. MUIS berfungsi sebagai badan hukum yang memberikan nasihat kepada presiden Singapura mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Tugas MUIS meliputi pengelolaan administrasi hukum Islam, pengumpulan zakat, pengaturan perjalanan ibadah haji, pengorganisasian sekolah-sekolah agama, serta pengelolaan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Muslim. Sebelum tahun 1968, pembangunan masjid dilakukan oleh masyarakat Muslim secara mandiri, tetapi setelah MUIS didirikan, lembaga ini mengambil alih tanggung jawab tersebut. Saat ini, terdapat sekitar 70 masjid di Singapura yang dikelola dengan bantuan dan pengawasan dari MUIS. (A. Rahman et al., 2020)

Dengan demikian, pendidikan Islam di Singapura telah mengalami transformasi signifikan dari sistem tradisional menuju pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi, mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan komunitas Muslim di negara tersebut.

Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Kurikulum PAI Masa Pra-Kemerdekaan

Pada dasarnya, perhatian terhadap pendidikan agama Islam sangat minim pada masa pra-kemerdekaan. Pendidikan pada periode ini dipengaruhi oleh kolonialisme, yang mengakibatkan bangsa ini dididik untuk melayani kepentingan penjajah. Selama masa penjajahan, semua bentuk pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan kolonial. Awalnya, penjajah tidak memiliki niat untuk memperhatikan pendidikan, melainkan hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, seperti rempah-rempah. Namun, bangsa Eropa juga memiliki misi untuk menyebarkan agama, sehingga pada abad ke-16 dan ke-17, mereka mendirikan lembaga pendidikan untuk tujuan penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk mereka, tetapi juga untuk penduduk lokal yang beragama Kristen. Selanjutnya, penjajah menyadari perlunya pegawai rendah yang mampu membaca dan menulis untuk mendukung usaha mereka, terutama dalam sistem tanam paksa, sehingga lembaga pendidikan dibentuk. Namun, akses pendidikan ini masih terbatas hanya untuk anak-anak dari kalangan priyai. Konsep pendidikan kolonial bertujuan untuk mencetak pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah, bukan untuk membentuk generasi yang mencintai bangsa dan tanah air mereka. Sebaliknya, pendidikan ini lebih berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dan norma masyarakat penjajah, sehingga penduduk pribumi menjadi terikat pada pemerintahan kolonial.

Kurikulum PAI Masa Orde Lama (1945–1965)

Kurikulum pada era Orde Lama terbagi menjadi tiga periode, yaitu Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, dan Kurikulum 1964. Kurikulum 1947, yang dikenal sebagai Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947, baru mulai diterapkan secara praktis pada tahun 1950 karena beberapa alasan. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1950. Pelaksanaan pendidikan agama Islam diatur dalam SKB dua menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama) pada tahun 1946. Kurikulum 1947 masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Jepang dan Belanda, mungkin karena Indonesia baru saja merdeka. Proses pendidikan lebih difokuskan untuk menciptakan individu yang mencintai negara, sehingga mereka menjadi berdaulat dan memiliki kesadaran berbangsa.

Selanjutnya, Kurikulum 1952, yang dikenal sebagai Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952, berisi pengajaran yang harus disampaikan kepada siswa dalam bentuk mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan Sejarah. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Pada tahun 1951, SKB dua menteri menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah dengan minimal dua jam per minggu. Selain itu, DEPAG juga berupaya membentuk kurikulum agama di sekolah dan pesantren, yang dipimpin oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor. Kurikulum agama yang disusun kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952, di mana pendidikan agama mendapatkan porsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi fokus dalam Rentjana Pendidikan 1964. Konsep ini mewajibkan setiap sekolah untuk membimbing siswa agar mampu memecahkan masalah secara mandiri. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini dikenal sebagai gotong royong terpimpin. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Krida pada hari Sabtu, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakat mereka, seperti kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan. Kurikulum 1964 dirancang untuk mencetak manusia Indonesia yang Pancasilais dengan sifat-sifat yang tercantum dalam Tap MPRS No. II Tahun 1960.

Kurikulum PAI Masa Orde Baru (1966–1998)

Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru membawa dampak signifikan pada pendidikan nasional. Model kurikulum yang diterapkan selama era Orde Baru mencakup Kurikulum 1968, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model terintegrasi, meskipun kebijakan pendidikan agama.

Selanjutnya, terdapat Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, fokus pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Pada era ini, istilah satuan pelajaran diperkenalkan sebagai rencana pengajaran untuk setiap topik. Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 1975 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Melalui SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), kurikulum madrasah 1975 ditetapkan dengan porsi 30% untuk pendidikan agama dan 70% untuk pendidikan umum. Dengan demikian, ijazah madrasah setara dengan ijazah dari sekolah umum, dan siswa madrasah yang ingin pindah ke sekolah umum diakui dan diperbolehkan. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum penerapan Kurikulum 1975.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul Kurikulum 1984, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, peran siswa ditingkatkan menjadi mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Model pembelajaran ini dikenal sebagai Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL), di mana guru berfungsi sebagai fasilitator, sehingga metode ceramah tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum. Pendidikan agama diperkuat melalui SKB dua menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri), yang menegaskan bahwa lulusan madrasah juga dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum.

Selanjutnya, ada Kurikulum 1994, yang merupakan hasil upaya untuk mengintegrasikan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 1984. Yang perlu dicatat dalam periode ini adalah terbitnya UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989, yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam. Ini berarti bahwa muatan kurikulum, struktur, dan konsepnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya UU SISDIKNAS ini, pendidikan Agama Islam akhirnya berjalan seiring dengan sistem pendidikan nasional.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Era Reformasi (1999 – Sekarang)

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Era Reformasi telah dipengaruhi oleh perubahan yang menekankan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan nasional. Era reformasi ini memberikan kesempatan yang luas untuk merumuskan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformis dan revolusioner. Visi dari era ini adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kompetitif, maju, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kurikulum di era reformasi juga mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah Kurikulum 2004, yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini muncul sebagai salah satu dampak dari reformasi yang berlangsung pada waktu itu. Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah menetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Sejak saat itu, pendidikan dipahami sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk kekuatan spiritual keagamaan.

Di antara ciri-ciri utama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah: penekanan pada pencapaian kompetensi siswa daripada sekadar menyelesaikan materi; kurikulum yang dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, baik yang normal, sedang, maupun tinggi; fokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran; orientasi pada proses dan hasil; penggunaan pendekatan dan metode yang beragam serta kontekstual; guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan; buku pelajaran bukanlah satu-satunya sumber belajar; pembelajaran sepanjang hayat; serta kemampuan untuk belajar mengetahui (*learning how to know*), belajar melakukan (*learning how to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*), dan belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*). Dalam kurikulum KBM, pendekatan pembelajaran lebih mengarah pada Contextual Teaching and Learning (CTL), yang mencakup konstruktivisme, inkuiri, pertanyaan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Dengan diterapkannya kurikulum 2004, hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan pendidikan agama Islam, sehingga madrasah juga menjadikan kompetensi sebagai dasar. Namun, setelah dua tahun, KBK digantikan oleh Kurikulum 2006, yang lebih dikenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dari KBK, tetapi perbedaan utama terletak pada kewenangan penyusunannya, yang mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sementara sekolah diharapkan dapat mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi lokal. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah), dengan pemerintah pusat hanya memberikan pedoman yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Dengan demikian, sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki hak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah/sekolah dijelaskan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan pada bulan Mei 2008, Menteri Agama menandatangani PERMENAG No. 02 Tahun 2008, yang mengatur standar kompetensi lulusan dan standar isi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada tahap berikutnya, diperkenalkanlah Kurikulum 2013 (K-13). Ciri-ciri yang melekat pada K-13 meliputi: pertama, mewujudkan pendidikan yang berkarakter; kedua, menciptakan pendidikan yang berwawasan lokal; dan ketiga, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Selanjutnya, muncul kurikulum baru yang hingga saat ini belum diterapkan secara menyeluruh di sekolah maupun madrasah. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan kurikulum prototipe yang dinamakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai kerangka yang lebih fleksibel, berfokus pada materi dasar, serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa.

Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini didasarkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti. Nadiem Makarim, sebagai penggagas wacana merdeka belajar, terutama di perguruan tinggi, menjelaskan tiga poin utama dalam gagasan ini: teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Poin pertama berkaitan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sementara itu, poin kedua dan ketiga menekankan pentingnya penguatan keberagaman, yang mencakup minat dan kemampuan siswa, sehingga penilaian kinerja siswa tidak hanya berdasarkan angka pencapaian akademik, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas lain, termasuk ekstrakurikuler.

Terkait dengan profil pelajar Pancasila, Kemendikbud telah menetapkan enam indikator. Indikator pertama adalah kemampuan bernalar kritis untuk memecahkan masalah, yang berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, di mana siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka secara mandiri dan mencari pengetahuan. Ketiga, kreativitas, di mana siswa dapat menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, serta memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya. Keempat, gotong-royong, di mana siswa memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, yang merupakan keterampilan penting di masa depan.

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah telah berjalan dengan baik dan efisien. Keberhasilan ini berkat pemetaan yang dilakukan guru terhadap siswa, yang memungkinkan penetapan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Penerapan kurikulum ini memudahkan guru dalam menyampaikan materi pokok PAI tanpa terbebani oleh materi lain yang kurang penting. Materi PAI yang luas disederhanakan menjadi bagian-bagian esensial yang diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Materi penting yang harus dipelajari siswa mencakup Iman, Islam, dan Ihsan, dengan urutan pengajaran yang meliputi

akidah, Al-Qur'an, Hadits, Fikih, Akhlak, dan Tarikh, yang dipilih berdasarkan hukum fardhu 'ain dan manfaatnya bagi masyarakat.

Di madrasah, Kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Madrasah memiliki dua opsi dalam implementasinya: tetap menggunakan Kurikulum 2013 dengan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka, atau mengembangkan kurikulum operasional sesuai visi dan misi madrasah. Madrasah juga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan pembelajaran dan penilaian, serta menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Soft skill yang paling krusial untuk masa depan adalah kemampuan berkolaborasi dalam tim. Selanjutnya, kebinekaan global bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap keberagaman budaya, agama, dan ras, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menegaskan identitas mereka sebagai warga dunia. Selain itu, pentingnya berakhlak mulia mencakup aspek moral, spiritual, dan etika.

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat sekolah menengah telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi. Keberhasilan ini didukung oleh pemetaan dan identifikasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, yang memungkinkan penetapan tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan penerapan kurikulum ini, guru dapat lebih mudah mengajarkan materi pokok PAI tanpa harus terbebani oleh materi yang kurang esensial. Materi PAI yang luas akan disederhanakan menjadi beberapa bagian penting yang diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan mendalam. Materi yang harus dipelajari siswa mencakup Iman, Islam, dan Ihsan, dengan urutan pengajaran yang meliputi akidah, Al-Qur'an, Hadits, Fikih, Akhlak, dan Tarikh, yang dipilih berdasarkan hukum fardhu 'ain dan relevansinya bagi masyarakat.

Sementara itu, penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah dilakukan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam proses ini, madrasah memiliki dua pilihan: tetap menggunakan Kurikulum 2013 dengan menerapkan beberapa prinsip dari Kurikulum Merdeka, atau mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan visi dan misi madrasah. Madrasah juga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan pembelajaran dan penilaian, serta menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Madrasah melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan fokus pada proyek penguatan profil pelajar. Ini mencakup penerapan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan capaian pembelajaran yang sesuai, serta mendorong inovasi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Madrasah menerapkan pendekatan Kurikulum Merdeka dengan menekankan pada proyek penguatan profil pelajar. Hal ini melibatkan penerapan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan capaian pembelajaran yang relevan, serta mendorong inovasi dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian guna meningkatkan mutu pendidikan.

Kurikulum Pendidikan Islam di Singapura

Kurikulum pendidikan Islam di Singapura, yang dikenal sebagai Singapore Islamic Education System (SIES), dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara aspek agama dan akademik. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran umum dan pendidikan agama, serta terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan agama dengan mata pelajaran umum, seperti matematika dan sains, untuk memastikan pendidikan yang komprehensif.

Selain itu, fokus pada pembacaan Al-Quran, akhlak, sejarah Islam, dan fiqh bertujuan membentuk karakter siswa dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika Islam.

MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) bertanggung jawab untuk standarisasi kurikulum dan silabus di semua madrasah, memastikan kualitas pendidikan yang konsisten. Kurikulum juga mengalami modernisasi dengan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Pendidikan Islam di Singapura menghadapi tantangan dalam menjaga identitas agama di tengah masyarakat sekuler, namun dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, pendidikan ini memiliki peluang untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan global.

Kurikulum pendidikan Islam di Singapura, yang dikenal sebagai Singapore Islamic Education System (SIES), merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara aspek agama dan akademik. Sistem ini tidak hanya mencakup mata pelajaran umum, tetapi juga pendidikan agama yang terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Integrasi Kurikulum

Kurikulum Azhari dan Kebangsaan: Madrasah sepenuh waktu menerapkan Kurikulum Azhari, sedangkan madrasah separuh waktu mengikuti Kurikulum Kebangsaan yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan mata pelajaran umum.

Mata Pelajaran

Selain pendidikan agama siswa juga mempelajari mata Pelajaran seperti matemati, sains dan Bahasa untuk memastikan pendidika yang komprehensif dan relevan

Fokus pada Pendidikan Agama

- Pembacaan Al-Quran dan Akhlak : Kurikulum ini menekankan pembacaan Al-Quran, serta studi akhlak, sejarah Islam, dan fiqh, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika Islam. Pengembangan Karakter: Pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.
- Modernisasi dan Inovasi: Pembaruan Berkala : Kurikulum diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Metode Pembelajaran Interaktif : Pendekatan yang interaktif dan partisipatif diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar.
- Standarisasi dan Pengawasan, Pedoman dari MUIS : Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) bertanggung jawab untuk standarisasi kurikulum dan silabus di semua madrasah, memastikan kualitas pendidikan yang konsisten di seluruh institusi. Evaluasi dan Penilaian : Proses evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dan pencapaian siswa, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
- Keterlibatan Komunitas. Masukan dari Masyarakat : Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pengembangan kurikulum sangat penting untuk memastikan relevansi pendidikan yang diberikan. Program Ekstrakurikuler : Madrasah menawarkan program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa, serta memperkuat ikatan komunitas.
- Tantangan dan Peluang. Tantangan Identitas : Pendidikan Islam di Singapura menghadapi tantangan dalam menjaga identitas agama di tengah masyarakat yang cenderung sekuler. Peluang Adaptasi : Dengan dukungan pemerintah dan

masyarakat, pendidikan Islam memiliki peluang untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan global yang terus berubah.

- **Implementasi Kurikulum.** Pelatihan Guru : Guru-guru di madrasah mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman mereka terhadap kurikulum. Sumber Daya Pendidikan : Penggunaan sumber daya pendidikan yang bervariasi, termasuk buku teks dan media digital, mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.
- **Kegiatan Pembelajaran.** Kegiatan Praktis dan Proyek Kolaboratif : Siswa terlibat dalam kegiatan praktis dan proyek yang melibatkan kerja sama antar siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan.
- **Dukungan Pemerintah.** Bantuan Keuangan dan Kebijakan Pendidikan: Pemerintah Singapura memberikan dukungan keuangan untuk madrasah dan mengintegrasikan kebijakan yang mendukung pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.
- **Peran Teknologi.** Pembelajaran Daring dan Inovasi Digital : Penggunaan platform pembelajaran daring dan integrasi teknologi dalam kurikulum untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, terutama selama masa pandemi.
- **Evaluasi dan Umpan Balik.** Sistem Penilaian Berkala: Penilaian dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas kurikulum, serta untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dan orang tua yang digunakan untuk perbaikan lebih lanjut.

Kurikulum pendidikan Islam di Singapura dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara agama dan akademik, dengan tujuan membentuk generasi Muslim yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum, pelatihan guru, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kementerian Agama Republik Indonesia secara berkala melakukan evaluasi dan revisi kurikulum untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pelatihan Guru

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru madrasah dan pesantren. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogis dan pemahaman guru terhadap kurikulum yang diterapkan, sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan Islam dengan membangun dan merenovasi madrasah dan pesantren. Program ini mencakup penyediaan ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan dana untuk pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

Pengawasan dan Akreditasi

Untuk memastikan kualitas pendidikan Islam, pemerintah melakukan pengawasan dan akreditasi terhadap lembaga pendidikan Islam. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) bertugas untuk menilai dan memberikan akreditasi kepada madrasah dan pesantren, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas pendidikan yang ditawarkan.

Kerjasama dengan Masyarakat

Implementasi kebijakan pendidikan Islam juga melibatkan peran serta masyarakat. Komunitas dan organisasi keagamaan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam, baik melalui dukungan finansial maupun partisipasi dalam kegiatan pendidikan. Hal ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan kurikulum, pelatihan bagi para guru, penyediaan fasilitas pendidikan, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi dengan masyarakat, diharapkan pendidikan Islam dapat berperan dalam menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang luas dan akhlak yang baik.

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Singapura

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Singapura mencerminkan upaya komunitas Muslim dalam mempertahankan identitas religius mereka di tengah masyarakat sekuler dan multikultural. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi tersebut:

Peran Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)

MUIS berperan sebagai lembaga utama yang mengatur dan mengawasi pendidikan Islam di Singapura. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum, akreditasi madrasah, dan pelatihan guru. Salah satu inisiatif penting MUIS adalah penerapan Singapore Islamic Education System (SIES), yang menyesuaikan kurikulum ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat modern Singapura, terutama dalam format paruh waktu.

Integrasi Kurikulum Sekuler dan Agama

Madrasah di Singapura mengadopsi pendekatan kurikulum terpisah (*separated curriculum*), di mana mata pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris diajarkan bersama dengan studi Islam. Siswa madrasah mengikuti ujian nasional seperti Primary School Leaving Examination (PSLE) dan General Certificate of Education (GCE) 'O' Level, memastikan mereka memenuhi standar pendidikan nasional.

Kebijakan Pendidikan Wajib dan Tantangannya

Penerapan Compulsory Education Act pada tahun 2003 mewajibkan semua anak mengikuti pendidikan dasar. Madrasah harus memenuhi standar akademik tertentu agar

tetap diakui sebagai lembaga pendidikan formal. Hal ini mendorong madrasah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan infrastruktur mereka.

Program Pendidikan Agama Paruh Waktu

Selain madrasah penuh waktu, MUIS juga mengelola program pendidikan agama paruh waktu yang dilaksanakan di masjid-masjid. Program ini dirancang untuk anak-anak Muslim yang bersekolah di sekolah umum, memberikan mereka pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan spiritual mereka.

Tantangan dan Upaya Berkelanjutan

Meskipun telah banyak kemajuan, pendidikan Islam di Singapura masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk terus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. MUIS dan komunitas Muslim terus berupaya memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan berkualitas dalam konteks masyarakat Singapura yang sekuler dan multikultural. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Singapura menunjukkan komitmen komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas religius mereka sambil beradaptasi dengan kebijakan nasional dan dinamika masyarakat modern.

SIMPULAN

Penggunaan platform dan aplikasi digital dalam pembelajaran dan penilaian bahasa Inggris di sekolah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan motivasi, keterlibatan, dan kompetensi siswa. Berbagai aplikasi berbasis gamifikasi, platform LMS, serta media kolaboratif mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik, sementara teknologi asesmen digital memungkinkan evaluasi keterampilan bahasa yang lebih autentik dan efisien. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan kebutuhan pengembangan instrumen penilaian yang valid. Oleh karena itu, integrasi platform dan aplikasi digital dalam pembelajaran bahasa Inggris perlu dilakukan secara selektif, terencana, dan berbasis pada prinsip pedagogis untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwairiyah, H. D., & Muqit, A. (2017). Perbandingan Pendidikan Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 11(2), 291-306. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185>
- Kosim, M. (2011). Pendidikan Islam di Singapura. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 433. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i2.43>
- Rahman, A., Warsah, I., & Murfi, A. (2020). Islamic Education System in Singapore: Current Issues and Challenges. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 197-222. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.197-222>
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna*, 6(1), 1-8.
- Rama, B. (2024). *Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks , dimulai sejak masuknya agama Islam ke nusantara . Pengaruh Islam pertama*

kali dirasakan di pesisir Sumatra , tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai , pada abad ke-13. 15(1), 75–93.

Samuri, S. (2022). Kelangsungan Pendidikan Agama Islam di Negara Sekuler: Madrasah di Singapura. *Yasin*, 2(6), 757–774. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i6.705>

Syakrani, A. W., Malik, A., Hasbullah, H., Budi, M., & Maulidan, M. R. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Singapura. *ADIBA: Journal of Education*, 2(4), 517-527.

Warosari, Y. F. (2022). Analisis Peran MUIS Terhadap Kebijakan Pendidikan Islam Pada Madrasah Di Singapura. *Jurnal Adzkiya*, 6(1), 1–21.

Zalnur, M. (2024). Pendidikan Islam di Inggris Islamic education in England. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 219–237. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5618>